

**PERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG SURABAYA DALAM PENERIMAAN
ASAS TUNGGAL PANCASILA BERDASAR SUMBER LISAN PARA KADER**

Vivi Yunita Aisyah

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

vivi_yusha@yahoo.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta sebagai komitmen keummatan dan kebangsaan, dan HMI Cabang Surabaya merupakan organisasi mahasiswa Islam terbesar di Surabaya sepanjang Orde Lama hingga Orde Baru. HMI Cabang Surabaya dibentuk pada tahun 1952 saat PKI tengah gencar melakukan *ofensif*. PKI menuntut pembubaran HMI, dan mampu digagalkan oleh HMI dengan cara diplomatis serta atas kerjasama dari organisasi lain di Surabaya yang menentang komunisme. Kader HMI Surabaya melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) oleh pemerintah Orde Baru yang dianggap mempersempit ruang gerak mahasiswa. Sedangkan menanggapi kebijakan Asas Tunggal, HMI Cabang Surabaya dan HMI Badko Jatim menjadi pelopor penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal.

Kata Kunci : Pancasila, HMI Cabang Surabaya, Sumber Lisan.

Abstract

Islamic Students Association (HMI) is an extra-campus students organization that was established on February 5, 1947th in Yogyakarta as moslems and nationality commitment, and HMI Branch Surabaya is the largest Islamic student organization in Surabaya along the Old Order to the New Order. HMI Branch Surabaya was formed in 1952nd when the PKI was conducted heavily offensive. PKI demanded the dissolution of the HMI, and able to be defeated by diplomatic means, and HMI with the cooperation of other organizations in Surabaya who opposed communism. Surabaya HMI cadres refused rallies policy of normalization of campus life / campus coordination agency (NKK / BKK) by the New Order government considered the space to students. While the policy response to single principle, HMI Branch Surabaya and HMI Badko East Java became a pioneer acceptance of Pancasila as the single principle.

Keywords: Pancasila, HMI Branch Surabaya, Oral History.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

HMI didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, di Yogyakarta oleh seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) bernama Lafran Pane. Pada fase perkembangannya, HMI mampu menarik minat dan perhatian banyak mahasiswa untuk bergabung. Hingga mendirikan beberapa cabang di tingkat kota / kabupaten. HMI Cabang Surabaya dibentuk pada tahun 1952 dengan melantik R. Daldiri Mangoendiwirdjo sebagai ketua umum. HMI Cabang Surabaya merupakan organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar selama era Orde Lama hingga Orde Baru.

Tujuan dibentuk HMI di Surabaya ini sama dengan tujuan pokok HMI, yaitu mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia yang di dalamnya terkandung wawasan atau pemikiran kebangsaan atau ke-Indonesiaan, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam yang di dalamnya terkandung pemikiran ke-Islaman. Kedua komitmen yang menjadi dasar tujuan HMI ini dirumuskan kembali dalam tujuan HMI yang telah diperbarui berdasarkan hasil Kongres IX HMI di Malang pada tahun 1969 dan berlaku hingga saat ini.

Tujuan tersebut ialah "Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT." dirumuskan dalam pasal 4 Anggaran Dasar (AD) HMI.

Sebagai organisasi kader, wujud nyata perjuangan HMI dalam komitmen keumatan dan kebangsaan adalah melakukan proses perkaderan yang bertujuan membina kader berkualitas insan cita yang terbagi dalam tiga jenjang perkaderan: Latihan Kader I (*Basic Training*), Latihan Kader II (*Intermediate Training*), dan Latihan Kader III (*Advance Training*). Dengan harapan dan penuh keyakinan bahwa mereka akan mampu mencapai tataran kesadaran yang sangat tinggi akan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, negara, pemerintah dan masyarakat aparaturnya serta masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya untuk memimpin perjuangan pembangunan sekarang demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila.¹

Perlawanan terhadap PKI Sepanjang Pemerintahan Orde Lama

¹ Soehardjono, 1982, *Mengintegrasikan Kepentingan Individu dan Tujuan Organisasi*, Malang, Majalah Kampus "SANGKAKALA" Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), halaman 46.

Tingkah laku PKI dalam mewujudkan Negara komunis di Indonesia lewat berbagai cara telah menimbulkan gesekan dan benturan politik, sosial, budaya dan militer sepanjang tahun 1960-1965 dapat ditangkap oleh para pemimpin organisasi kemahasiswaan di tingkat nasional antara lain Sulastomo dan Sumarno Dipodisastro (HMI), Harry Tjan Silalahi, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia (PMKRI), Marsilan Simanjuntak, Pimpinan Serikat Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL), Rosihan Anwar, dan Hariadi Darmawan Ketua DEMA UI. Pada bulan-bulan mendekati akhir September 1965 para pimpinan mahasiswa tersebut telah memastikan akan terjadi benturan dahsyat antara PKI dan lawan-lawan politiknya.²

Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965, Radio Republik Indonesia di Jakarta dalam suatu siaran warta-beritanya pada pagi hari menyiarkan adanya suatu *coup d'etat* (perebutan kekuasaan) yang telah dilaksanakan oleh suatu dewan yang menamakan dirinya "Dewan Revolusi Indonesia", yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa.³

Ketika diadakan pengusutan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap para pelaku Gestapu, ternyata gerakan kontra revolusi G 30 S adalah direncanakan, digerakkan dan didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)⁴ dengan bantuan mantel-mantel organisasinya seperti: Pemuda Rakyat, GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia), CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), HSI (Himpunan Sarjana Indonesia), dan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Tuduhan terhadap PKI sebagai arsitek Gestapu menjadi kenyataan dengan pengakuan Letnan Kolonel Untung sendiri dan tokoh-tokoh PKI yang diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB).⁵

Awal era 60-an merupakan pertentangan yang sangat keras antara HMI dan PKI dengan semua organisasi onderbouwnya (Pemuda Rakyat, GMI, Gerwani, Sobsi). HMI bersama-sama dengan GMNI Surabaya bekerjasama dalam menghadapi serangan dari CGMI. Tahun

² Aminuddin Kasdi, 2007, *G.30.S./1965 Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia Siapa Dalangnya: PKI?*, Surabaya, Java Pustaka Media Utama, halaman 14.

³ C.S.T. Kansil dan Julianto, 1983, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta, Erlangga, halaman 80.

⁴ Sehingga kemudian peristiwa ini disebut dengan G.30.S/PKI

⁵ *Ibid*, halaman 81

1965 di Surabaya dibentuk Resimen Mahasiswa yang disebut Mahasurya.

Moment ini dimanfaatkan oleh kader-kader HMI Surabaya sebagai peluang untuk mendidik teman-teman sesama anti komunis agar mendapat pengenalan tentang pelatihan militer yang dilatih oleh Marinir / KKO (Korps Komando). Pelatihan berlangsung selama satu bulan pada Februari tahun 1965 di Kesatuan KKO Gunung Sari Surabaya.⁶ Tujuh bulan kemudian meletus pemberontakan oleh PKI yang lazim disebut G 30 S/ PKI pada tanggal 30 September 1965.

Bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 1965, Walikota Surabaya ditangkap karena terlibat pemberontakan yang dilakukan PKI. Baru setelah itu terjadi penangkapan-penangkapan yang dilakukan pihak militer, dan dibantu Banser NU. Proses pemadaman peristiwa 30 September 1965 yang bersejarah itu akhirnya menjatuhkan Sukarno dari kursi kekuasaannya sebagai presiden/ kepala Negara dan melarang terus berdirinya PKI.⁷

Gagal membubarkan HMI dalam G 30 S, PKI melancarkan serangan terhadap HMI di Surabaya, PKI melancarkan serangan terhadap HMI pada tanggal 2 Juni 1966 malam hari pukul 23.00 WIB dengan meledakkan bom di kediaman R. Daldiri yang berlokasi di Jl. Gubeng No. 40 Surabaya.⁸

Serangan kedua seminggu kemudian yakni tanggal 9 Juni 1966 dengan meledakkan bom di kantor sekretariat HMI Cabang Surabaya di Jl. Sumatera No. 36 A. Kedua serangan tersebut gagal. Kader-kader HMI Cabang Surabaya kemudian melakukan aksi demonstrasi atas serangan-serangan PKI di depan rumah dinas Gubernur Jawa Timur pada pertengahan tahun 1966.⁹

Meletusnya peristiwa G 30 S/ PKI menandai babak awal dari proses peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama di bawah Soekarno kepada rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Pada awal 1970-an orientasi ekonomi pemerintahan Orde Baru menghendaki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan orientasi politik diarahkan pada penciptaan stabilitas politik yang tinggi dengan pengetatan kendali politik untuk mendukung kebijakan ekonomi tersebut.

⁶ Tjuk Sukiardi, 1998, *Partai Politik di Masa Soekarno*, Surabaya, Badan Arsip Daerah.

⁷ Alfian, 1978, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia, halaman. 46.

⁸ R. Daldiri Mangoendiwirdjo, wawancara, 2012, Surabaya.

⁹ Sri Soebekti, wawancara, 2013, Malang.

Sejalan dengan politik departaisasi yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru, organisasi ekstra-universitas (ormek) seperti HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan GMKI mulai dieleminasi pengaruhnya di kampus. Untuk menarik pengaruh ormek dari dunia kemahasiswaan di kampus, pada tanggal 23 Juli 1973 di bentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), semua organisasi ekstra diharuskan bergabung dalam KNPI.

Pembentukan KNPI dimotori oleh Jenderal Ali Moertopo. Hadirnya KNPI berarti menetralisasi kembali kekuatan politik mahasiswa yang telah tumbuh menjadi kekuatan sendiri sejak tahun 1957, ketika terjadi kerjasama mahasiswa-militer. Dengan KNPI berarti eksistensi mahasiswa sebagai kekuatan politik tidak diakui lagi dan selanjutnya eksistensi dilebur menjadi satu bersama kaum muda lainnya.

Terhadap organisasi mahasiswa intra-universitas, pemerintah mengeluarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.028/1974 yang isinya mengharuskan mahasiswa untuk minta izin kepada rektor apabila hendak melakukan kegiatan, sementara terhadap organisasi ekstra diharuskan bergabung dalam KNPI.

Sepanjang tahun 1974-1976 aktivitas mahasiswa hanya diwarnai protes terhadap SK 028/1974 yang mencapai puncak pada tahun 1976. Aktivitas politik mahasiswa muncul kembali pada pertengahan 1977 hingga awal 1978 bersamaan dengan pelaksanaan pemilu dan Sidang Umum MPR. Isu utama yang dikembangkan adalah demokrasi, suatu tema yang lekat dengan gerakan mahasiswa paska kemerdekaan. Setelah peristiwa itu kebijakan depolitisasi diterapkan secara lebih sistematis. Secara formal KNPI diakui sebagai wadah tunggal organisasi pemuda dalam GBHN hasil sidang umum MPR 1978.

Sejak ada KNPI organisasi mahasiswa berdasarkan ideologi seperti HMI diharuskan bernaung dibawah KNPI dan dikontrol oleh Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga. Kehadiran KNPI yang sentralistis terkait secara formal dengan birokrasi pemerintahan, meskipun diusahakan diimbangi oleh beberapa organisasi mahasiswa melalui kelompok Cipayung yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan kritis terhadap politik nasional, tetapi tidak mengurangi laju perkembangan KNPI.¹⁰

Langkah-langkah pengendalian terhadap organisasi intra-kampus dilancarkan lewat SK

¹⁰ Hasanuddin M. Saleh, 1996, *HMI dan Rekeyasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta, Lingkar, halaman 95.

Pangkopkamtib No.02/Kopkam/I/1978 tertanggal 21 Januari 1978 yang membekukan Dewan Mahasiswa. SK Pangkopkamtib ini diperkuat pelaksanaannya lewat Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1/U/1978 yang ditanda tangani oleh Sjarif Thajeb pada tanggal 31 Januari 1978. Kemudian menyusul sesaat setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 19 April 1978 Daed Joesoef segera mengeluarkan SK No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK).

Langkah ini dimaksudkan untuk memangkas kekuatan politik mahasiswa dan mengarahkan kegiatan perguruan tinggi pada pelaksanaan fungsi akademik, yang dikondisikan untuk tidak bersentuhan dengan persoalan politik.

Secara konsep, NKK berniat membunuh aktivitas politik mahasiswa. Hal ini semakin nyata ketika serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada NKK tersebut.

Pertama adalah SK Menti No.037/U/1978 tentang bentuk penataan kembali kehidupan kampus, dan kedua intruksi Dirjen Pendidikan Tinggi No.002/DJ/Inst/1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga-lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi.

SK No.037/U/1978 ini secara implisit melarang dihidupkan kembali Dewan Mahasiswa dan hanya mengizinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkan fakultas, yakni Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Sesuai dengan NKK, SMF sebagai lembaga eksekutif kegiatannya dibatasi dalam tiga bidang : (1). Bidang kesejahteraan mahasiswa; (2) bidang minat mahasiswa (kegemaran, seperti olahraga dan kesenian); dan (3) bidang pengembangan pemikiran mahasiswa. Dan untuk tingkat nasional SMF hanya di ijinakan membentuk ikatan mahasiswa sejenis.

Kebijakan yang paling penting dari SK ini adalah pemberian kekuasaan kepada Rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, sebagaimana bunyi SK tersebut: "...Lembaga – lembaga kemahasiswaan yang didasarkan pada ketiga jenis kebutuhan mahasiswa itu, tanggung jawab mengenai pembentukan, pengarahan dan perkembangannya berada di tangan Rektor Universitas c.q. Pembantu Rektor III (urusan kemahasiswaan)."¹¹

Instruksi Dirjend Pendidikan Tinggi No.002/DK/Inst./1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan kembali lembaga-lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan

penjelasan teknis lebih lanjut terhadap pelaksanaan NKK. Intruksi ini sering disebut dengan instruksi BKK, karena di dalamnya memuat ketentuan dibentuknya Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Badan inilah yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan mahasiswa.

Protes keras dalam bentuk demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi, terutama dikota-kota besar, termasuk di Surabaya yang dimotori oleh organisasi ekstra kampus karena melihat kebijakan pemerintah tersebut terlalu jauh mencampuri urusan intern kemahasiswaan.

Atas penerapan NKK/BKK tersebut mahasiswa IKIP Surabaya (sekarang UNESA) menunjukkan protesnya dengan melakukan aksi tolak NKK/BKK secara besar-besaran hingga beberapa diantara mahasiswa tersebut ditangkap dan ditahan oleh aparat militer.¹²

Sebelum terjadi pembekuan dema, salah satu kader HMI ITS yang sekaligus menjadi anggota dewan mahasiswa ITS ditangkap oleh satuan militer pada saat melakukan kerja praktek lapangan di kampus ITB , Bandung yaitu Mochammad Djamil.

Dicurigai akan melakukan aksi susulan dengan dema ITB akhirnya membuat Djamil dikelung di kampus ITB dan diamankan di Bandung selama lebih dari dua bulan. Dalam pengamanan itu semua akses informasi mengenai kenegaraan ditutup rapat, tidak boleh ada interaksi sama sekali dengan dunia luar. Hal ini dilakukan agar tahanan mahasiswa ini tidak mengetahui informasi kondisi politik teraktual sehingga mampu meminimalisir terjadinya aksi-aksi yg melawan kebijakan pemerintah.

Terhadap dua kondisi yang sangat menonjol pada akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an yang cukup berpengaruh terhadap penentuan arah identifikasi HMI.

Pertama, terhadap tuntutan kepekaan mahasiswa terhadap realitas sosial yang terancam oleh kebijakan penataan pendidikan tinggi dengan konsep NKK/BKK. Mahasiswa menginginkan tetap dipertahankan suasana kehidupan kemahasiswaan yang terintegrasi dengan realitas sosial di mana mahasiswa menempatkan dirinya sebagai kekuatan kontrol.

Kedua, suasana antusiasme berislam dikalangan kaum muda menghendaki HMI lebih mengentalkan identitas ke-Islamannya. HMI sejak awal kelahirannya mengambil Islam sebagai ideologinya.

¹¹ *Ibid.*, halaman 40.

¹² Supriyanto (Sekretaris Umum HMI Cabang Surabaya 1981-1982 dari IKIP Surabaya), wawancara, 2012, Jakarta.

Asas Tunggal Pancasila

Dalam pengertian sederhana ideologi adalah seperangkat keyakinan yang berorientasi pada tingkah laku. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan, serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan.

Fungsi ideologi adalah mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arus dalam tindakan manusia serta memperkuat rasionalitas sistem kekuasaan sehingga dapat memiliki legitimasi. Dalam perspektif ini ideologi bersifat konservatif.

HMI sejak awal kelahirannya mengambil Islam sebagai ideologinya. Dalam rumusan anggaran dasar HMI, ideologi diletakkan sebagai asas. Setiap Kongres Anggaran Dasar ditetapkan kembali. Selain menetapkan anggaran dasar yang memuat asas itu, kongres juga menetapkan tafsir asas, tafsir tujuan, dan tafsir independensi yang sebenarnya merupakan suatu paket sistem penjelasan tentang ideologi HMI.

Tafsir Asas terbentuk dalam rumusan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang merupakan upaya penyederhanaan pemahaman rukun Iman dalam Islam sehingga dapat dijadikan landasan operasional gerak organisasi HMI. Tafsir tujuan merupakan penajaman orientasi yang telah dirumuskan dalam tujuan HMI.¹³

Berbeda dengan pemerintahan yang digantikannya, rezim Orde Baru tidak mentolelir adanya konflik yang berdasarkan ideologi, berupaya mengeliminir kekuatan-kekuatan sosial yang memiliki potensi konflik, khususnya kekuatan sosial politik yang bukan berafiliasi dengan rezim.

HMI sejak awal terbentuknya mengidentifikasi diri dengan kepentingan umat Islam secara keseluruhan, pada awal kemunculan Orde Baru sampai pertengahan tahun 1970-an masih bisa berkompromi dengan kebijakan politik yang di tempuh Orde Baru. Akan tetapi, pada akhir tahun 1970-an komunitas HMI menjadi relatif lebih peka terhadap kondisi degradasi kekuatan Umat Islam, khususnya di bidang politik dan mencoba meninjau kembali realitas sosial, ekonomi dan politik yang telah dan tengah berlangsung.¹⁴

Tanggal 16 Agustus 1982 di hadapan DPR, Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan, dikemukakan gagasan supaya organisasi kekuatan sosial politik berasas tunggalkan Pancasila.

Menanggapi isu asas tunggal Pancasila, HMI memberikan respon politik yang kontroversial. Pada Kongres XV di Medan, HMI Cabang Surabaya memberikan respon yang sangat berbeda. Hampir semua peserta kongres menolak adanya asas tunggal Pancasila, namun HMI Cabang Surabaya mempunyai pendirian bahwasanya menjadikan Pancasila sebagai asas bukanlah suatu hal yang salah. Asas merupakan prinsip, dan agama merupakan ajaran yang di dalam ajaran itu mengandung prinsip, jadi antara Islam dengan Pancasila itu sejalan dan tidak bertentangan.¹⁵

Kongres HMI XV tahun 1983 di Medan menghasilkan keputusan HMI secara tegas dan institusional menolak keinginan pemerintah agar HMI mencantumkan asas tunggal Pancasila dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Paska penolakan Asas Pancasila dalam kongres tersebut, HMI Surabaya dan HMI Badko Jawa Timur mengadakan koordinasi ke beberapa Cabang di Nusantara memberikan penjelasan tentang penerapan Asas Pancasila agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Upaya ini tidak sia-sia, beberapa Cabang dan Badko pada akhirnya memahami konsep Pancasila sebagai Asas HMI tidak bertentangan dengan Islam. Sehingga pada kongres XVI tahun 1986 di Padang HMI sepakat mencantumkan dalam anggaran dasar HMI, yaitu pada pasal 4 : Organisasi ini berasaskan Pancasila; dan pasal 3: Organisasi ini menghimpun mahasiswa Islam yang beridentitaskan Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.

PENUTUP

Demikianlah, HMI Cabang Surabaya turut mampu mempertahankan eksistensinya hingga saat ini sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Surabaya meski mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Beberapa sumber akurat dan memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan disajikan secara hati-hati dengan penuh kecermatan. Namun demikian, hasil penelitian ini masih terbuka sifatnya, dan menerima masukan yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

¹³ Hasanuddin M. Saleh, 1996, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta, Lingkar, halaman 54.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 80.

¹⁵ M. Amin Zein, wawancara, 2012, Surabaya.

Buku-buku :

Alfian, 1978, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

Aminuddin Kasdi, 2007, *G.30.S./1965 Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia Siapa Dalangnya: PKI?*, Surabaya, Java Pustaka Media Utama.

C.S.T. Kansil dan Julianto, 1983, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta, Erlangga, halaman 80.

Hasanuddin M. Saleh, 1996, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta, Lingkaran, halaman 95.

Soehardjono, 1982, *Mengintegrasikan Kepentingan Individu dan Tujuan Organisasi*, Malang, Majalah Kampus "SANGKAKALA" Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).

Wawancara:

Tjuk Sukiardi, 1998, *Partai Politik di Masa Soekarno*, Surabaya, Badan Arsip Daerah.

R. Daldiri Mangoendiwardjo, wawancara, 2012, Surabaya.

Sri Soebekti, wawancara, 2013, Malang.

Supriyanto (Sekretaris Umum HMI Cabang Surabaya 1981-1982 dari IKIP Surabaya), wawancara, 2012, Jakarta.

M. Amin Zein, wawancara, 2012, Surabaya.

Surat Kabar :

Surabaya Post, 1 April 1988.

Surabaya Post, 24 Februari 1983.

Surabaya Post, 18 Februari 1982.

Surabaya, 15 Juli 2013

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Drs. Sumarno, M.Hum.
NIP. 19650424 199302 1 001